

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KAMPUNG NELAYAN

Jurnal Pengembangan Kota (2018)

Volume 6 No. 1 (35–44)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.6.1.35-44

Diana Kristina S.* , Wido Prananing Tyas

*Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro*

Abstrak. Kawasan Tambaklorok merupakan permukiman nelayan di Kota Semarang, yang rentan terhadap rob dan penurunan tanah. Laju penurunan tanah saat ini mencapai > 8 cm/tahun dan akan semakin parah. Sebagai satu-satunya permukiman nelayan dan masuk dalam deliniasi kawasan kumuh, pemerintah merencanakan program pembangunan berkonsep kampung nelayan. Program ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan lingkungan serta meningkatkan perekonomian. Sebagai program yang direncanakan di kawasan yang sudah terbangun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta preferensi masyarakat terhadap program kampung nelayan. Metode yang digunakan adalah *explanatory sequential mixed methods*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagian masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. Warga lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana. Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak melibatkan masyarakat, di antaranya sosialisasi yang lebih intensif. Saat ini sudah dilaksanakan sosialisasi namun perlu lebih ditingkatkan.

Kata kunci: penataan; pelibatan masyarakat; kampung nelayan

[Title: Community Engagement in Settlement Arrangement of Fishermen Village]. Tambaklorok is a fishing settlement in Semarang which is vulnerable to tide and land subsidence. Currently, the land subsidence in this area is about > 8 cm/yr and getting worse. Tambaklorok is the only fisherman's settlement and a high-level slum area, therefore the government plans a program which a nautical village concept. This program is expected to reduce environmental problems and improve the economy, particularly in a densely populated areas. Hence, this study aims to determine the involvement of the community in the planning process as well as the community preference. This study applied explanatory sequential mixed methods. The results showed that most of the respondents were not involved in the planning process. The community doesn't know how to convey their aspirations. Most of the fishermen have different preferences with the Government's design. Residents prefer the area's arrangement with a simple design. The recommendations related to this research are the need for more community involvement, such as more intensive socialization. There has been socialization but should be further improved.

Keyword: arrangement; community engagement; fishermen village

Cara mengutip: Kristina, D., Tyas, W. P. (2018). Penataan Kawasan Permukiman pada Daerah Rawan Bencana, Studi Kasus Kawasan Pesisir Semarang. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 6 (1): 35-44. DOI: 10.14710/jpk.6.1.35-44

1. PENDAHULUAN

Kawasan pesisir merupakan kawasan spesifik yang berbatasan dengan pantai dan memiliki posisi penting dalam pembangunan dunia (Wang, Liu, Wang, & Wang, 2014). Salah satu bagian kawasan pesisir adalah kawasan permukiman yang pada umumnya memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk tinggi dan posisinya yang spesifik menyebabkan daerah ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir karena air pasang

(rob) dan penurunan tanah (Wang, dkk., 2014). Di daerah perkotaan, rob yang dikombinasikan dengan penurunan tanah merupakan ancaman yang besar (Marfai & King, 2008) karena akan

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

*email: nok.diana@gmail.com

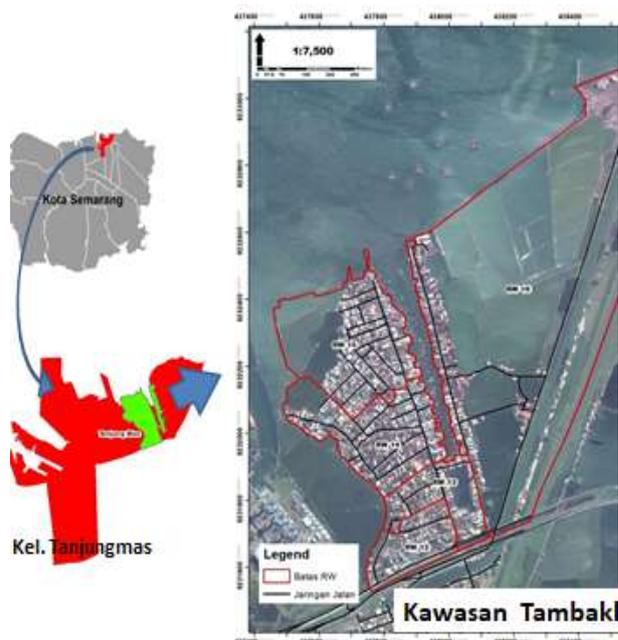
Diterima 28 April 2018, disetujui 20 Juni 2018

sangat berpotensi menjadi kawasan kumuh (Kim & Rowe, 2013). Fenomena penurunan tanah ini banyak dialami di daerah perkotaan dan membutuhkan solusi (Hu, Yue, Wang, & Wang, 2004). Fenomena penurunan tanah terjadi karena laju pembangunan yang tidak terkontrol oleh beban bangunan, pengambilan air tanah, serta konsolidasi alami tanah alluvial, dan penurunan geotektonik (Takagi, Esteban, Mikami, & Fujii, 2016). Daerah yang paling terdampak oleh penurunan tanah adalah daerah pesisir, itulah sebabnya perencanaan pembangunan di daerah pesisir perlu kehati-hatian (Shubin, 2016). Salah satu prinsip kehati-hatian yaitu melalui pembatasan perencanaan pembangunan di daerah rawan bencana, termasuk daerah pesisir, untuk mengurangi konsekuensi negatif dari penurunan kualitas lingkungan (Kim & Rowe, 2013). Serta perlu penataan penggunaan lahan yang tepat di daerah pesisir (Baser & Biyik, 2016).

Permasalahan kawasan pesisir karena rob dan penurunan tanah juga dialami oleh Kota Semarang bagian utara. Berdasarkan jenis tanahnya, Kota Semarang bagian utara, tersusun dari tanah aluvial yang masih sangat muda dengan kompresibilitas yang sangat tinggi (Andreas, Abidin, Gumilar, Sidiq, & Yuwono, 2017). Ini didukung pula dari hasil studi Marfai, Almohammad, Dey, Susanto, dan King (2008), yang menyebutkan bahwa selama tahun 1908 hingga 1937, garis pantai Kota Semarang berkembang relatif cepat menuju ke laut sekitar 0.5 km sampai 1 km atau rata-rata maju sekitar 16 meter/tahun. Itulah sebabnya proses pemadatan tanah masih terus berlangsung dan menyebabkan penurunan tanah di bagian utara sangat tinggi.

Salah satu Kawasan Kota Semarang yang mengalami permasalahan rob dan penurunan tanah adalah Kawasan Tambaklorok (lihat Gambar 1) (Setioko, Pandelaki, & Murtini, 2013). Laju penurunan tanahnya adalah sebesar > 8 cm/tahun (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2001) dan diperkirakan akan semakin tinggi setiap tahunnya (Andreas, 2016). Pendapat tersebut di dukung dengan hasil penelitian penurunan tanah oleh Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan ITB tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2016, yang menunjukkan bahwa penurunan tanah di Kota Semarang bagian

utara dan bagian utara-timur semakin tinggi setiap tahunnya (Andreas, 2016).



Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan Tambaklorok

Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjungmas (RW XII – RW XVI), Kecamatan Semarang Utara. Memiliki luas kurang lebih 17,60 Ha. Pada tahun 2016, jumlah penduduk keseluruhan adalah sebanyak ± 9.602 jiwa. Jumlah kepala keluarga ± 2.365 KK yang menempati 1.965 unit rumah (Satker PKP Jawa Tengah, 2017). Hal ini berarti bahwa 1 rumah ditempati 1-3 KK. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah pekerja swasta dan kaum buruh sebesar 61%, kemudian disusul oleh pekerja nelayan sebesar 35%. Jumlah nelayan di Kawasan ini adalah sebesar 71% dari jumlah nelayan keseluruhan di Kota Semarang (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2017).

Kawasan ini merupakan satu-satunya kampung nelayan di Kota Semarang (Bappeda Kota Semarang, 2016) dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 546 jiwa/Ha (lihat Gambar 2).



Keterangan:

 : Salah satu area tambatan perahu nelayan

Gambar 2. Kawasan Tambaklorok & Salah Satu Area Tambatan Perahu Nelayan.

Kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi disertai permasalahan rob, menyebabkan kawasan ini mengalami banyak masalah lingkungan seperti rusaknya infrastruktur serta kondisi persampahan yang ditemui di seluruh kawasan. Adapun kondisi genangan rob, infrastuktur jalan, dan kondisi sistem persampahan dapat dilihat berturut-turut pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.



Gambar 3. Genangan rob di Sekitar Permukiman



Gambar 4. Jalan terputus Karena Rob



Gambar 5. Sampah di Sekitar Permukiman

Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, pemerintah Kota Semarang merencanakan suatu program pembangunan di permukiman nelayan Tambaklorok dengan konsep kampung nelayan/kampung bahari. Rencana pembangunan Kampung Bahari akan memakan waktu 20 tahun yang terbagi dalam 6 (enam) zona, yaitu (1) zona permukiman; (2) zona permukiman vertikal; (3) zona perdagangan dan jasa; (4) zona wisata bahari dan kuliner; (5) zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim; dan (6) zona konservasi (Dinas Tata Ruang Kota Semarang, 2015).

Permasalahan terjadi karena program kampung nelayan direncanakan di kawasan yang sudah terbangun dan memiliki kepadatan sangat tinggi. Sehingga dalam perencanaan dan proses pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat akan mendukung proses perencanaan dari bawah untuk mengembangkan

kawasan (Ferreira, Seixas, & Marques, 2015). Diharapkan dengan melibatkan masyarakat pada proses perencanaan akan mampu menyelesaikan permasalahan suatu kawasan (Marpaung, 2016).

Keterlibatan ini juga harus mengakomodir semua pihak termasuk perempuan (Mutimukuru-Maravanyika, Mills, Asare, & Asiedu, 2016). Melalui wawancara di tahap awal suatu perencanaan maka akan diketahui permasalahan dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkan dari pembangunan (Karlsson & Hovelsrud, 2015). Melalui wawancara ini juga akan diketahui kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dan kebutuhan utama mereka (Kawabe, dkk., 2013). Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya diamati tetapi juga merupakan sumber data tentang risiko dan lingkungan (Bonati & Mendes, 2014). Tantangan lain dalam menata Kawasan Tambaklorok adalah sulitnya mempertahankan keberlanjutan kawasan permukiman dan semakin rendahnya minat generasi muda dalam menggeluti kegiatan ekonomi bahari (Bappeda Kota Semarang, 2016).

Berdasarkan hal di atas, kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kawasan permukiman kampung nelayan serta preferensi masyarakat terhadap program kampung nelayan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelibatan masyarakat di Kampung Nelayang Tambaklorok, penelitian ini menjadikan masyarakat sebagai target penelitian. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya pada kawasan pantai yang dikonservasi di Portugal yang menggunakan pengunjung dan sukarelawan dalam menilai hasil pengembangan kawasan pantai yang dikonservasi dengan melibatkan masyarakat (Ferreira, dkk., 2015).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory sequential mixed methods*. Di tahap awal penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan metode kuantitatif, menganalisisnya kemudian menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk menyusun data dan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk

menerangkan secara lebih detail hasil dari data kuantitatif (Creswell, 2013).

Penyusunan data kuantitatif menggunakan teknik *simple random sampling* sebanyak 100 responden, yang tersebar secara proporsional di tiap RW. Kurang lebih 50% dari responden adalah nelayan dan sisanya non-nelayan, sehingga terdapat keterwakilan antara responden nelayan dan non nelayan. Teknik *simple random sampling* dipilih karena sasaran utama adalah seluruh Masyarakat Kawasan Tambaklorok. Sedangkan penyusunan data kualitatif pada tahap kedua menggunakan metode *purposive random sampling*. Kriteria pemilihan responden adalah masyarakat Tambaklorok yang telah tinggal dan bekerja di sekitar Tambaklorok selama lebih dari 10 tahun.

Analisis data kuantitatif dilakukan melalui pengelompokan data, mentabulasi, dan menyajikan data secara statistik deskriptif. Sedangkan dalam analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun data hasil wawancara, pengamatan lapangan dan bahan lainnya secara sistematis. Sehingga data yang ada dapat dibuat kesimpulan dan dapat diceritakan kepada orang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelibatan masyarakat pada awal proses perencanaan bertujuan untuk meminimalkan konflik (Ferreira, dkk., 2015). Meskipun Prenzel dan Vanclay (2014), menyebutkan bahwa konflik merupakan bagian dari proses yang pasti akan muncul dalam suatu pembangunan, tetapi tetap harus diminimalkan. Pelibatan ini dibentuk melalui komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan minat mereka terhadap isu-isu wilayah (Marpaung, 2016). Pada perencanaan kampung nelayan, selain melibatkan pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk mengurangi konflik pada saat pembangunan dan agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, sebagian besar responden tidak pernah dilibatkan dalam perencanaannya. Mereka yang dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut hanya ketua kelompok nelayan dan para

ketua RW. Karena tidak ada pertemuan rutin ditingkat masyarakat, maka informasinya tidak sampai ke masyarakat. Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan dalam sosialisasi program, menyebabkan para nelayan tidak memiliki wadah untuk dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Pada akhirnya masyarakat nelayan menjadi masyarakat yang terpinggirkan dan suara mereka tidak dianggap (Schuhbauer & Sumaila, 2016). Hal tersebut yang akhirnya menyebabkan mereka kekurangan informasi terkini (Lloret, dkk., 2016). Kemudian banyak asumsi yang timbul di antara warga terhadap program. Sebagian warga berpendapat bahwa program ini tidak diperuntukkan bagi nelayan tetapi diperuntukkan untuk pelabuhan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat diluar Tambaklorok. Pembangunan kampung nelayan berdampak pada penggusuran warga. Sehingga warga berasumsi bahwa pembangunan ini akan menghilangkan warga Tambaklorok secara perlahan-lahan.

Disebutkan di atas bahwa mayoritas masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan dan sosialisasi. Tetapi sebagian masyarakat mengetahui tentang keberadaan program kampung nelayan. Pengetahuan terhadap program dan zonasi di dapatkan dari warga lain yang tergusur.

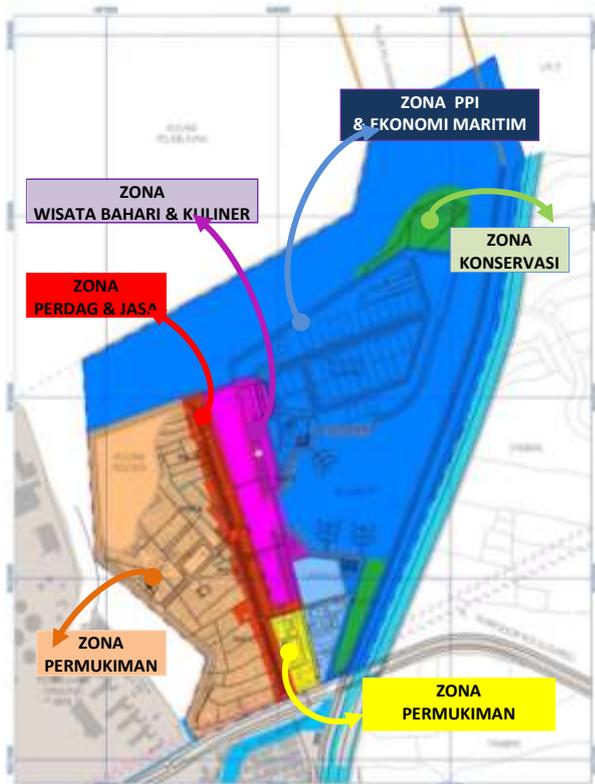
Mayoritas kaum nelayan di Tambaklorok memiliki pendidikan yang rendah. Lebih dari separuh kaum nelayan tidak lulus SD dan seperempatnya menempuh pendidikan hingga tamat SD. Sehingga mereka tidak memiliki keterampilan lain yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan di daratan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk pindah dari kawasan tersebut. Selain karena tidak memiliki keterampilan lain dan mereka tidak dapat bekerja selain melaut, juga karena merasa sudah nyaman tinggal di Tambaklorok. Nelayan tidak bisa tinggal jauh dari laut karena segala aktivitasnya harus berada dekat laut, berada di dekat lokasi tambatan kapal, dan membutuhkan tempat yang luas. Aktivitas tersebut seperti perbaikan jaring, perbaikan kapal, dan menjemur ikan atau membuat ikan asin. Segala aktivitas dan latar belakang pendidikan menyebabkan mereka kesusahan jika harus pindah dari Tambaklorok. Meskipun mayoritas pendidikan nelayan rendah,

para nelayan berusaha untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dan mayoritas dari mereka tidak menghendaki anaknya menjadi nelayan.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan penduduk non-nelayan. Mayoritas adalah lulusan SMA dan yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hanya sebagian kecil penduduk dengan mata pencaharian non-nelayan, tidak menggantungkan hidupnya pada tempat tinggal, sehingga sebagian responden yang bermata pencaharian non-nelayan ingin meninggalkan kawasan ini.

Rencana program kampung nelayan tertuang dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) terdiri dari 6 (enam) zona (lihat Gambar 6), yaitu:

1. **Zona Permukiman**, yaitu zona permukiman eksisting;
2. **Zona Permukiman Vertikal**, diarahkan dikembangkan pada area reklamasi (disposal area).
3. **Zona Perdagangan dan Jasa**, diarahkan untuk dikembangkan pada area di sepanjang jalan utama.
4. **Zona Wisata Bahari dan Kuliner**, akan dikembangkan di kawasan Tambakrejo. didesain dengan karakter seperti rumah panggung dan sebagai kawasan yang mencirikan kampung nelayan.
5. **Zona Pelabuhan Perikanan dan Ekonomi Maritim**, dikembangkan sebagai pusat aktivitas bahari, terdiri dari PPI, dermaga, dan akan dikembangkan pula industri maritim.
6. **Zona Konservasi mangrove**, dikembangkan terutama di ujung timur area industri maritim.



Gambar 6. Perencanaan Kampung Bahari (Dinas Tata Ruang Kota Semarang, 2015)

Menurut Najafinasab, Karbassi, dan Ghoddousi (2015), perencanaan di kawasan pesisir memiliki tiga tujuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyediakan kebutuhan sosial, dan untuk pelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Pada program kampung nelayan Tambaklorok, peningkatan perekonomian dijabarkan dengan adanya zona perdagangan dan jasa serta zona wisata bahari dan kuliner. Sebagai pelestarian lingkungan diaplikasikan dengan adanya zona konservasi mangrove. Sedangkan desain untuk memenuhi kebutuhan sosial diketahui melalui pelibatan masyarakat tentang preferensi mereka terhadap program. Preferensi mereka terhadap program diketahui dari hasil wawancara mendalam kepada masyarakat dan ahli. (Midori, dkk., 2013) menyebutkan bahwa melalui wawancara kepada masyarakat sebagai penerima program akan mengetahui kebutuhan utama mereka. Karena sebagus dan selengkap apapun desain suatu program, jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan sia-sia. Artinya masyarakat tidak akan memanfaatkannya dan pada akhirnya pembangunan tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Preferensi masyarakat

terhadap program didapatkan dari hasil wawancara mendalam terhadap penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat nelayan memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. Berikut akan disajikan hasil analisis per zona kawasan.

Pada penataan zona permukiman eksisting, akan dibangun kolam tampung, MCK Umum dan IPAL Komunal, pembangunan plaza (alun-alun) di tengah permukiman penduduk dan peningkatan jalan Tambakmulyo selebar 20 meter. Hampir semua responden menyetujui pembangunan kolam tampung dan MCK umum serta IPAL komunal. Pembangunan fasilitas tersebut berada di lokasi yang tidak ada penghuninya, sehingga tidak akan menghilangkan warga Tambaklorok. Berbeda dengan pembangunan plaza (alun-alun) dan peningkatan jalan. Terkait kedua pembangunan tersebut, sebagian besar masyarakat nelayan tidak setuju. Pembangunan kedua fasilitas tersebut berada di kawasan yang padat sehingga nantinya akan cukup banyak warga yang dihilangkan demi keperluan pembangunan tersebut. Jika yang dihilangkan dari kawasan tersebut adalah nelayan, maka akan memisahkan nelayan dari laut. Seperti telah disajikan di atas, bahwa nelayan tidak bisa hidup jika jauh dari laut dan akan menyusahkan mereka. Mereka akan kesulitan mencari tempat tinggal lain di Tambaklorok, sementara mereka tidak akan bisa berpindah ke daerah yang jauh dari laut. Jika yang harus berpindah adalah non-nelayan, mereka tidak akan bisa menikmati hasil pembangunan. Responden berpendapat bahwa pembangunan jalan terlalu lebar untuk kawasan permukiman dan mereka tidak membutuhkan jalan yang terlalu lebar. Bagi warga, lebar jalan secukupnya saja asalkan bisa dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Harusnya kampung ini mengakomodir nelayan dengan kebutuhannya. Di sisi lain, keberadaan alun alun yang tidak dikelola dengan benar akan dimanfaatkan pemuda untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Fungsi plaza dapat disalahgunakan sebagai area berkumpulnya pemuda dan melakukan hal yang bersifat negatif. Kasus ini sudah terjadi di sepanjang *sheet pile* yang baru selesai dibangun. Di akhir pekan, fungsi *sheet pile* berubah menjadi tempat berkumpulnya sejumlah pemuda untuk mabuk.

Kemudian zona permukiman vertikal, pembangunan rusun merupakan suatu perencanaan yang berpihak kepada rakyat. Dibangun untuk mengatasi permukiman penduduk yang tidak memiliki rumah. Memang tidak mudah merubah kebiasaan dari tinggal di rumah sendiri kemudian harus tinggal di rumah vertikal dan berbaur, tetapi ini adalah suatu proses yang harus dilewati. Tujuan utama pembangunan rusun di sini adalah sebagai alternatif tempat tinggal terutama bagi warga yang tergusur oleh pembangunan kampung nelayan. Dengan tujuan seperti itu, harusnya rusun dibangun di tahap awal proses pembangunan. Berdasarkan dokumen perencanaan, rusun baru akan dibangun di 5 tahun ketiga. Di sisi lain, pembangunan pada zona permukiman eksisting yang padat penduduk telah dilaksanakan di 5 tahun pertama. Sehingga banyak warga yang mendapatkan dampaknya, yakni harus berpindah dari kawasan dan tidak bisa menempati rusun. Pada akhirnya bukan warga asli yang akan menempati rusun tersebut.

Hasil penyebaran kuesioner tentang zona permukiman vertikal menunjukkan sebagian masyarakat nelayan dan non-nelayan menyetujui pembangunannya. Pembangunan rusun dapat diperuntukkan bagi warga Tambaklorok non-nelayan yang belum memiliki hunian. Dari responden menyatakan bahwa rusun tidak sesuai jika diperuntukkan untuk masyarakat nelayan. Nelayan membutuhkan ruang yang luas untuk meletakkan peralatannya dan tidak akan cukup jika disimpan di rusun. Nelayan membutuhkan tempat yang luas untuk memperbaiki jaring sehingga dibutuhkan fasilitas untuk perbaikan jaring dan aktivitas nelayan lain. Sebagian warga khawatir jika sudah tua dan tidak dapat membayar sewa lagi, sedang rusun harus selalu membayar.

Zona perekonomian terdiri dari zona perdagangan dan jasa serta zona wisata bahari dan kuliner. Respon responden yang menolak dan menerima terhadap zona ini adalah berimbang. Warga berharap keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hanya saja perlu diantisipasi adanya kecemburuan antar warga, karena tidak semua warga dapat berdagang di situ. Di sisi lain, belum tentu zona perekonomian ini dimiliki oleh warga asli Tambaklorok. Bisa saja justru akan ada orang di luar kawasan yang akan

menempatinnya. Sehingga pada akhirnya bukan kesejahteraan bagi warga Tambaklorok. Dalam pembangunan kawasan perekonomian seharusnya mempertimbangkan dahulu kondisi mata pencaharian penduduk di sana, bagaimana masyarakat mampu mengalami transisi kehidupan menuju kampung wisata bahari. Salah satu narasumber mengatakan bahwa belum tentu pembangunan zona perekonomian di kampung nelayan itu akan cocok untuk warga. Sehingga bisa saja keberadaan program ini tidak akan menyejahterakan warga, mungkin malah menyengsarakan mereka. Terlebih lagi jika tidak ada proses transisi masyarakat menuju kampung bahari dan tidak ada keterlibatan warga dalam proses perencanaannya.

Zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim akan dialokasikan di ujung utara RW XVI Kawasan Tambaklorok atau yang biasa disebut dengan Kawasan Tambakrejo. Sebagian besar warga nelayan sangat tidak setuju dengan adanya pembangunan zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim tersebut. Kurang dari separuh warga non-nelayan juga sangat tidak setuju dengan pembangunan pelabuhan perikanan, PPI dan ekonomi maritim yang lokasinya jauh dari permukiman penduduk. Keberadaan zona ini akan memaksa warga untuk memindahkan perahu mereka dari yang semula berada dekat dengan rumah menjadi jauh. Dermaga yang jauh dari rumah akan mempersulit warga untuk mengamati kapal dan peralatan nelayan mereka akan rawan terhadap kehilangan. Lokasinya yang jauh akan mempersulit warga untuk membawa peralatan melaut mereka dari rumah ke kapal, padahal peralatan melaut mereka sangat banyak. Sehingga mereka membutuhkan transportasi khusus. Selain itu, mereka membutuhkan aktivitas memperbaiki jaring dan kapal yang biasa dilakukan di dekat kapal. Aktivitas ini biasa dilakukan pada sore hari saat tidak melaut. Hanya sebagian kecil warga yang setuju dengan pembangunan zona pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim di ujung utara RW XVI. Mereka yang setuju atas pembangunan zona ini karena berharap lingkungan perumahan dapat lebih bersih dan tertata. Adapun pada zona konservasi mangrove, hampir semua responden menyetujuinya karena dapat mencegah abrasi.

4. KESIMPULAN

Pembangunan kampung nelayan direncanakan di kawasan yang sudah terbangun dan memiliki kepadatan sangat tinggi. Seharusnya dalam perencanaan pembangunan tersebut, perlu ada pelibatan masyarakat. Tujuan pelibatan masyarakat ini adalah untuk mengurangi konflik pada saat pembangunan dan agar pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada akhir pembangunan dapat membawa masyarakat ke kondisi yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan kampung nelayan. Mereka yang dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut hanya ketua kelompok nelayan dan para ketua RW. Karena tidak ada pertemuan rutin ditingkat masyarakat, maka informasinya tidak sampai ke masyarakat. Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan dalam sosialisasi program, menyebabkan para nelayan tidak memiliki wadah untuk dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhannya.

Hasil penelitian pada 6 (enam) zona kampung nelayan Tambaklorok, menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat memiliki preferensi yang berbeda dengan desain yang ditawarkan. Sebagai masyarakat nelayan, mereka tidak bisa dijauhkan dari laut. Jika hal ini terjadi akan menyengsarakan mereka, disebabkan karena nelayan tidak bisa bekerja di darat. Program kampung nelayan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat nelayan dan mengadopsi kebutuhan nelayan ternyata masih kurang. Dalam hal desain dirasa kurang sesuai dengan preferensi warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tambaklorok lebih memilih penataan kawasan dengan desain yang sederhana dan tidak banyak menggusur, namun tetap mempertahankan kondisi eksisting.

Rekomendasi terkait dengan penelitian ini adalah perlunya bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang lebih banyak melibatkan masyarakat, di antaranya sosialisasi yang lebih intensif. Sebenarnya selama ini sudah terdapat sosialisasi, tetapi hanya ditujukan untuk perwakilan yaitu ketua kelompok nelayan dan pada ketua RW. Untuk ke depan, perwakilan masyarakat bisa

ditambah dalam pelibatan berbagai bentuk pembangunan dan penataan permukiman. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan akan lebih tepat guna.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, H. (2016). Penurunan Tanah di Semarang Kian Mengkhawatirkan. Diakses dari <https://indonesiana.tempo.co/read/83531/2016/07/28/heriandreas49/penurunan-tanah-di-semarang-kian-mengkhawatirkan>,
- Andreas, H., Abidin, H. Z., Gumilar, I., Sidiq, T. P., & Yuwono, B. (2017). *Adaptation and Mitigation of Land Subsidence in Semarang*. Artikel dipresentasikan di AIP Conference Proceedings.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2017). *Kota Semarang dalam Angka*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2016). *Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Kawasan Tambaklorok: Menciptakan Kampung Nelayan yang Berjati Diri*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Baser, V., & Biyik, C. (2016). The Problems and Resolution Approaches to Land Management in the Coastal and Maritime Zones of Turkey. *Ocean & Coastal Management*, 119, 30-37. doi:10.1016/j.ocecoaman.2015.09.018
- Bonati, S., & Mendes, M. P. (2014). Building Participation to Reduce Vulnerability: How Can Local Educational Strategies Promote Global Resilience? A Case Study in Funchal-Madeira Island. *Procedia Economics and Finance*, 18, 165-172. doi:10.1016/S2212-5671(14)00927-7
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (2001). *Peta Amblesan Tanah Semarang tahun 2000-2001, diukur dengan menggunakan GPS*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dinas Tata Ruang Kota Semarang. (2015). *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)*

- Kawasan Tambaklorok*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Ferreira, A., Seixas, S., & Marques, J. C. (2015). Bottom-up Management Approach to Coastal Marine Protected Areas in Portugal. *Ocean & Coastal Management*, 118, 275-281. doi:10.1016/j.ocecoaman.2015.05.008
- Hu, R. L., Yue, Z. Q., Wang, L. C., & Wang, S. J. (2004). Review on Current Status and Challenging Issues of Land Subsidence in China. *Engineering Geology*, 76(1), 65-77. doi:10.1016/j.enggeo.2004.06.006
- Karlsson, M., & Hovelsrud, G. K. (2015). Local Collective Action: Adaptation to Coastal Erosion in the Monkey River Village, Belize. *Global Environmental Change*, 32, 96-107. doi:10.1016/j.gloenvcha.2015.03.002
- Kawabe, M., Kohno, H., Ikeda, R., Ishimaru, T., Baba, O., Horimoto, N., . . . Oshima, Y. (2013). Developing Partnerships with the Community for Coastal ESD. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 14(2), 122-132. doi:10.1108/14676371311312842
- Kim, S., & Rowe, P. G. (2013). Are Master Plans Effective in Limiting Development in China's Disaster-prone Areas? *Landscape and Urban Planning*, 111, 79-90. doi:10.1016/j.landurbplan.2012.12.001
- Lloret, J., Cowx, I. G., Cabral, H., Castro, M., Font, T., Gonçalves, J. M. S., . . . Erzini, K. (2016). Small-scale Coastal Fisheries in European Seas are Not What They Were: Ecological, Social and Economic Changes. *Marine Policy*. doi:10.1016/j.marpol.2016.11.007
- Marfai, M. A., Almohammad, H., Dey, S., Susanto, B., & King, L. (2008). Coastal Dynamic and Shoreline Mapping: Multi-sources Spatial Data Analysis in Semarang Indonesia. *Environmental Monitoring and Assessment*, 142(1), 297-308. doi:10.1007/s10661-007-9929-2
- Marfai, M. A., & King, L. (2008). Tidal Inundation Mapping Under Enhanced Land Subsidence in Semarang, Central Java Indonesia. *Natural Hazards*, 44(1), 93-109. doi:10.1007/s11069-007-9144-z
- Marpaung, B. O. Y. (2016). Communication Strategy Planning of Fisherman Kampung Medan Belawan as a Tourist Destination. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 234, 344-352. doi:10.1016/j.sbspro.2016.10.251
- Midori, K., Hiroshi, K., Reiko, I., Takashi, I., Osamu, B., Naho, H., . . . Minlee, Y. (2013). Developing Partnerships with the Community for Coastal ESD. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 14(2), 122-132. doi:10.1108/14676371311312842
- Mutumukuru-Maravanyika, T., Mills, D. J., Asare, C., & Asiedu, G. A. (2016). Enhancing Women's Participation in Decision-making in Artisanal Fisheries in the Anlo Beach fishing Community, Ghana. *Water Resources and Rural Development*. doi:10.1016/j.wrr.2016.04.001
- Najafinasab, F., Karbassi, A. R., & Ghoddousi, J. (2015). Fuzzy Analytic Network Process Approach to Evaluate Land and Sea Criteria for Land Use Planning in Coastal Areas. *Ocean & Coastal Management*, 116, 368-381. doi:10.1016/j.ocecoaman.2015.07.023
- Prenzel, P. V., & Vanclay, F. (2014). How Social Impact Assessment Can Contribute to Conflict Management. *Environmental Impact Assessment Review*, 45, 30-37. doi:10.1016/j.eiar.2013.11.003
- Satker PKP Jawa Tengah. (2017). *Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (Neighborhood Upgrading Action Plan – NUAP) pada Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2). Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2017*. Semarang.
- Schuhbauer, A., & Sumaila, U. R. (2016). Economic Viability and Small-scale Fisheries — A Review. *Ecological Economics*, 124, 69-75. doi:10.1016/j.ecolecon.2016.01.018
- Setioko, B., Pandelaki, E. E., & Murtini, T. W. (2013). Towards Sustainable Urban Growth: The Unaffected Fisherman Settlement Setting (with case study Semarang Coastal Area). *Procedia Environmental Sciences*, 17, 401-407. doi:10.1016/j.proenv.2013.02.053
- Shubin, M. (2016). The Destruction of the Foundations of Structures in Coastal Areas of the Volgograd Region. *Procedia*

- engineering*, 150, 2232-2237.
doi:10.1016/j.proeng.2016.07.273
- Takagi, H., Esteban, M., Mikami, T., & Fujii, D. (2016). Projection of Coastal Floods in 2050 Jakarta. *Urban Climate*, 17, 135-145. doi:10.1016/j.uclim.2016.05.003
- Wang, G., Liu, Y., Wang, H., & Wang, X. (2014). A Comprehensive Risk Analysis of Coastal Zones in China. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 140, 22-31. doi:10.1016/j.ecss.2013.12.019